

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Peran Keteladanan Guru

Menurut Adam & Dickey “Peran guru sesungguhnya sangat luas yaitu guru sebagai pengajar, guru sebagai pembimbing, guru sebagai ilmuwan dan guru sebagai pribadi” (Safitri, D., 2025). Berdasarkan Undang-Undang No 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah atas” (Depdiknas RI (1945). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, Bab 1, Pasal 1 Menurut Sadirman (2020), guru mengemban berbagai peran dalam proses pendidikan, antara lain membina dan membimbing sikap dan perilaku siswa menuju kedewasaan diri. Peran-peran ini meliputi mengarahkan, mentransmisikan, memfasilitasi, menengahi, dan mengevaluasi.

Dalam kapasitas seorang guru dan pendidik, individu mengambil peran penting, memberikan kontribusi nilai yang signifikan terhadap martabat bangsa secara keseluruhan. Kehadiran guru sangat penting dalam membentuk bangsa dan membentuk peserta didik yang berintegritas dan bermoral. Pendidik memiliki rasa dedikasi dan keaslian intrinsik dalam membentuk struktur suatu bangsa dan pemerintahannya. Peran guru dijelaskan dalam Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 20 Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Pasal 52 Peraturan Pemerintahan No. 74 Tahun 2008 tentang Guru, yakni:

- a) Merencanakan pembelajaran
- b) Melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu
- c) Menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran
- d) Membimbing dan melatih peserta didik siswa
- e) Melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

- f) Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan.

Untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, memaksimalkan keterlibatan siswa, dan terus memotivasi siswa untuk mencapai tujuan akademik mereka, peran guru sangatlah penting. Upaya ini perlu berkelanjutan agar siswa tetap termotivasi. Salah satu pendekatannya adalah dengan menerapkan ujian yang terorganisir dan mempresentasikan hasilnya kepada siswa.

Sebagaimana dikemukakan oleh Praty Katz dalam (Aini,2020) peran guru meliputi komunikator, sahabat yang dapat memberikan bimbingan, motivator yang memberikan dukungan dan inspirasi, mentor dalam pengembangan nilai-nilai moral, perilaku dan sikap yang bertanggung jawab dan mandiri, serta penguasaan materi ajar.

Sebagai pendidik, instruktur harus memenuhi berbagai tanggung jawab, yang semuanya diuraikan di bawah ini: (Drs. Syaiful, 2021).

- 1) Inspirator: Guru perlu mampu menginspirasi anak-anak untuk belajar secara konstruktif. Banyak teori pembelajaran tidak diperlukan sebagai dasar nasihat ini (inspirasi). Solusi atas masalah yang dialami siswa lebih penting daripada teori itu sendiri.
- 2) Informator: Guru perlu mampu memberi tahu siswa tentang kemajuan ilmiah dan teknologi terkini. Guru membutuhkan informasi yang akurat dan bermanfaat. Guru harus berkomitmen pada pekerjaannya dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan siswa agar dapat menjadi informan yang efektif.
- 3) Fasiliator: Instruktur seharusnya mampu menyediakan sumber daya yang mendukung upaya pendidikan siswa. Jika seorang guru bertanggung jawab atas lingkungan belajar yang tidak menyenangkan, sudah menjadi kewajibannya untuk menyediakan sumber daya yang diperlukan agar kelas menjadi tempat yang nyaman bagi siswa untuk belajar.
- 4) Mediator: Guru harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang berbagai jenis media materiil dan non-materiil. Untuk meningkatkan efektivitas proses

keterlibatan pendidikan dengan siswa, media digunakan sebagai alat komunikasi. Guru dapat berperan sebagai mediator dalam percakapan.

- 5) Evaluator: Guru harus bermoral dan memberikan evaluasi yang mempertimbangkan faktor internal dan eksternal. Intinya, tujuan penilaian adalah membentuk anak-anak menjadi generasi yang cakap, kreatif, dan cerdas.

Selain uraian tugas guru yang telah disebutkan sebelumnya, seorang guru juga harus mampu menilai kepribadian setiap siswa untuk menentukan apakah semua siswa memperhatikan pelajaran di kelas atau apakah mereka mengobrol dengan teman-temannya. Oleh karena itu, jika guru sudah mengetahui karakter siswa, ia dapat merencanakan taktik dan strategi pengajaran di kelas dengan lebih baik agar siswa memperhatikan topik yang diajarkan. Agar semua siswa tetap tertarik saat guru menjelaskan topik tersebut, guru harus mampu membangkitkan minat belajar mereka dengan berbagai cara, seperti media pembelajaran, teknik pembelajaran, atau cara penyampaian materi. Hal ini juga penting untuk memahami kepribadian siswa.

2.1.1.1 Keteladanan Guru

Keteladanan guru merupakan tindakan penanaman akhlak yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki profesi dengan menghargai ucapan, sikap dan perilaku sehingga dapat ditiru orang lain yang dilakukan oleh pengajar kepada peserta didik. Hal ini diperkuat oleh Aziz (2025) bahwa guru menjadi ujung tombak dalam sebuah perubahan sehingga diharapkan akan munculnya sebuah generasi tangguh bagi sebuah bangsa atau Negara dari sentuhan tangan para guru. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Mulyasa (2023) bahwa keteladanan guru adalah sikap yang mempunyai pengaruh besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan sehingga berfungsi untuk membentuk kepribadian anak guna menyiapkan dan mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM). Sedangkan menurut Noviatri (2024) keteladanan guru adalah hal-hal baik dari guru yang patut ditiru atau dicontoh oleh siswa. Keteladanan mempunyai kontribusi yang besar dalam mendidik karakter. Keteladanan guru dalam segala aktivitasnya akan menjadi cermin bagi siswanya sehingga guru lebih mengedepankan aspek

perbuatan dalam bentuk tindakan nyata dari pada hanya sekedar berbicara tanpa aksi. Tamrin (2025) mengemukakan bahwa keteladanan dalam pendidikan merupakan metode efektif yang paling meyakinkan keberhasilannya dalam mempersiapkan dan membentuk peserta didik yang berkarakter dan berakhlak mulia. Di Indonesia dikenal beberapa jalur pendidikan yang memungkinkan dapat memberikan keteladanan yang dapat ditiru oleh siswa sehingga tumbuh menjadi orang dewasa berkarakter dan berakhlak mulia.

Dalam UU No. 20 tahun 2003 menjelaskan bahwa pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pada jalur pendidikan formal, ada dua unsur dominan yang dapat memberikan keteladanan kepada peserta didik, yaitu unsur pendidik dan tenaga kependidikan. Dalam melaksanakan tugasnya, pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban memberikan teladan kepada peserta didik. Jika guru sering menampilkan perbuatan yang tercela, misalnya saja berbohong berkata kasar, sombong, tidak menghargai pendapat orang lain, maka peserta didik juga akan menirunya. Oleh karena itu, guru harus benar-benar mampu memberikan teladan yang dapat ditiru oleh peserta didik. Menurut Hidayatullah (2010) ada beberapa guru yang merasa kesulitan dalam menerapkan keteladanan, karena perilaku guru sendiri belum bisa diteladani. Misalnya guru meminta siswanya untuk rajin membaca, tetapi guru tidak memiliki kebiasaan membaca. Inilah persoalan utama yang dihadapi guru dalam menerapkan keteladanan, karena modal meneladani siswa adalah guru harus melakukannya lebih dulu. Faktor penting dalam mendidik terletak pada keteladannya. Keteladanan bersifat multidimensi yang berarti bahwa keteladanan dalam berbagai aspek kehidupan. Keteladanan tidak hanya sekedar memberikan contoh dalam melakukan sesuatu, tetapi juga menyangkut berbagai hal yang dapat diteladani, termasuk kebiasaan-kebiasaan yang merupakan contoh keteladanan. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa keteladanan guru merupakan hal-hal baik dari guru yang menjadi ujung tombak sehingga siswa diharapkan menjadi generasi tangguh bagi bangsa melalui jalur formal.

2.1.1.2 Indikator Teladan Guru

Indikator keteladanan guru menurut Ki Hajar Dewantara berpusat pada falsafah "*Ing Ngarso Sung Tulodo*" (di depan memberi teladan). Berikut adalah rincian indikator keteladanan seorang pendidik berdasarkan pemikiran beliau:

2.1 Tabel Indikator Teladan Guru

Variabel	Dimensi Keteladanan Guru	Indikator	Sub-Indikator
Keteladanan Guru PPKn (Variabel X)	1 Keteladanan Kedisiplinan	a Disiplin Waktu	– Hadir di kelas VIII tepat waktu sebelum bel masuk berbunyi. – Memulai dan mengakhiri jam pelajaran PPKn sesuai jadwal kurikulum.
		b Disiplin Aturan & Tugas	– Mengenakan pakaian dinas dan atribut lengkap sesuai regulasi madrasah. – Mempersiapkan administrasi mengajar (RPP/Modul Ajar) sebelum masuk kelas.
		c Konsistensi Penegakan Aturan	– Memeriksa daftar kehadiran (presensi) siswa kelas VIII secara tertib. – Memberikan teguran atau sanksi yang mendidik bagi siswa yang melanggar aturan.
	2 Keteladanan Sopan Santun	a Kesantunan Verbal (Bahasa)	– Menggunakan kalimat yang santun, jelas, dan tidak kasar saat mengajar. – Terbiasa

			mengucapkan kata "Tolong", "Maaf", dan "Terima Kasih" kepada siswa.
		b Kesantunan Non-Verbal (Sikap)	– Menampilkan ekspresi wajah yang ramah, murah senyum, dan menyapa siswa. – Menunjukkan gestur tubuh yang menghormati siswa (tidak bertolak pinggang/menunjuk kasar).
		c Sikap Menghargai Orang Lain	– Mendengarkan dengan saksama saat siswa kelas VIII bertanya atau berpendapat. – Tidak memotong pembicaraan siswa atau teman sejawat di depan kelas.
	3 Keteladanan Karakter Madrasah	a Religiusitas (Akhlakul Karimah)	– Memimpin doa bersama sebelum dan sesudah proses pembelajaran dimulai. – Mengucapkan dan menjawab salam dengan sempurna saat berinteraksi.
		b Keadilan & Kebijakan	– Memberikan perhatian dan penilaian objektif kepada siswa tanpa pilih kasih. – Mengutamakan pendekatan persuasif dan kekeluargaan dalam menyelesaikan konflik kelas

Sumber: UU Guru dan Dosen No. 14/2005

2.1.2 Guru Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (PPKn)

2.1.2.1 Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokrasi, melalui aktifitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat. Pendidikan Kewarganegaraan adalah suatu proses yang dilakukan oleh lembaga pendidikan dimana seseorang mempelajari orientasi, sikap dan perilaku politik sehingga yang bersangkutan memiliki *political knowledge, awareness, attitude, political efficacy* dan *political participation*, serta kemampuan mengambil keputusan politik secara rasional dan menguntungkan bagi dirinya juga bagi masyarakat dan bangsa. Sejalan dengan pendekatan pendidikan saat ini, Rusdiawan R. (2020) berpendapat bahwa guru PPKn dituntut untuk mengembangkan penguatan karakter seperti mandiri, bernalar kritis, gotong royong, serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

Menurut Cogan dan Somantri dalam Purba, A., & Winataputra, U. S. (2024), tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah mempersiapkan peserta didik agar mampu berpartisipasi secara efektif, demokratis, dan bertanggung jawab di masyarakat. Oleh karena itu, guru PPKn berperan sebagai fasilitator diskusi yang melatih siswa mengemukakan pendapat dan menghargai pandangan orang lain. Tujuan pendidikan kewarganegaraan, menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional adalah membekali peserta didik dengan informasi dan keterampilan yang diperlukan untuk memahami dan melaksanakan tanggung jawabnya sebagai warga negara. Tujuannya adalah meningkatkan nilai, moralitas, dan sikap perilaku peserta didik melalui pembentukan manusia yang cerdas, cakap, dan bermoral. Guru PPKn (atau *civic education*) berfungsi sebagai garda terdepan dalam pendidikan moral. PPKn membahas tentang kewarganegaraan, moral, norma, hukum, dan budi pekerti guna mencetak generasi muda yang berkepribadian sesuai dengan Pancasila.

"Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) merupakan mata pelajaran yang termasuk dalam kurikulum sekolah yang bertujuan untuk

mengembangkan kesadaran dan penerapan cita-cita Pancasila, dengan tujuan akhir memfasilitasi pengembangan manusia yang optimal dan implementasi praktis dalam kehidupan sehari-hari," menurut Daryono dalam (Tohir, 2024).

Menurut Winataputra (Wahab, 2021), kemampuan memahami dan menggunakan berbagai pendekatan pembelajaran dipandang sebagai persyaratan dasar bagi guru dalam konteks pendidikan Pendidikan Kewarganegaraan. Karakteristik dan tujuan khusus pendidikan kewarganegaraan, lingkungan pendidikan tempat siswa berpartisipasi, tahap perkembangan dan kapasitas belajar siswa, keterbatasan waktu, dan kebutuhan belajar unik setiap siswa, semuanya harus dipertimbangkan ketika memilih metodologi.

2.1.2.2 Karakteristik Mata Pelajaran PPKn

Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) berkarakteristik sebagai pendidikan nilai dan moral. Fokus utamanya bukan sekadar menghafal teori, melainkan membentuk watak (*afektif*), membekali wawasan (*kognitif*), serta melatih keterampilan sosial (*psikomotorik*) untuk menjadi warga negara yang cerdas dan demokratis. Tiga pilar utama dalam karakteristik mata pelajaran ini meliputi:

1. Pengetahuan Kewarganegaraan (*Civic Knowledge*): Pemahaman mengenai konsep tata negara, hak asasi manusia, UUD 1945, ideologi Pancasila, dan kesadaran hukum.
2. Keterampilan Kewarganegaraan (*Civic Skills*): Kemampuan berpikir kritis, memecahkan masalah, dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan masyarakat atau pengambilan keputusan yang tepat.
3. Sikap Kewarganegaraan (*Civic Disposition*): Pembiasaan karakter seperti toleransi, gotong royong, cinta tanah air, menghargai keberagaman, dan sikap demokratis dalam kehidupan sehari-hari.

Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sangat lekat dengan pembentukan identitas siswa. Pada masa remaja awal ini, siswa dilatih untuk lebih peka terhadap norma sosial, memahami hak dan kewajiban mereka sebagai pelajar, serta peduli terhadap lingkungan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2.1.2.3 Tanggung Jawab Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Berdasarkan pedoman profesi, secara umum diatur dalam UU Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005 Tanggung jawab utama guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) adalah membentuk karakter siswa menjadi warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, sekaligus mengajar, mengevaluasi, dan menanamkan kesadaran hukum serta hak dan kewajiban bermasyarakat. Secara spesifik, tanggung jawab ini dijabarkan ke dalam beberapa poin penting berikut:

1. Pendidikan Karakter (*Civic Disposition*): Menjadi teladan (panutan) serta menanamkan sikap toleransi, disiplin, gotong royong, dan cinta tanah air
2. Transfer Pengetahuan (*Civic Knowledge*): Mengajarkan tata negara, sistem pemerintahan, konstitusi, Hak Asasi Manusia (HAM), dan hukum yang berlaku di Indonesia.
3. Pengembangan Keterampilan Warga Negara (*Civic Skills*): Membimbing siswa agar mampu berpikir kritis, memecahkan masalah, dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat serta berdemokrasi
4. Evaluasi Pembelajaran: Melaksanakan tugas akademik standar sesuai undang-undang, seperti menyusun perangkat ajar, menilai, dan mengevaluasi perkembangan belajar siswa.

2.1.3 Nilai Karakter Disiplin

2.1.3.1 Pengertian Disiplin

Menurut Heri Gunawan (2022), disiplin adalah tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan kepatuhan terhadap berbagai aturan dan ketentuan. Dua hal yang berkaitan dengan definisi disiplin: pertama, bagaimana disiplin seharusnya dipahami, dan kedua, bahwa disiplin berkaitan dengan berbagai aspek pikiran, perilaku, dan emosi.

Menurut Suharsimi Arikunto sebagaimana dikutip dalam Sulistiyono, (2022), disiplin dapat diartikan sebagai ketaatan individu terhadap peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan, dimotivasi oleh kesadaran intrinsik dan tanpa paksaan dari luar.

Disiplin menurut Goods dalam *Dictionary of Education* yang dikutip dalam Ali Imron (2020) mengatakan sebagai berikut:

1. Proses atau hasil pengarahan atau pengendalian keinginan, dorongan atau kepentingan guna mencapai maksud atau untuk mencapai tindakan yang efektif.
2. Mencari tindakan sendiri dengan ulet, aktif dan diarahkan sendiri, sekalipun menghadapi rintangan.
3. Pengendalian perilaku secara langsung dan otoriter dengan hukuman atau hadiah
4. Pengekangan dorongan dengan cara yang tak nyaman dan bahkan menyakitkan.

Menurut Efendi dan Delita (2022), Disiplin mencakup berbagai bentuk hubungan yang membantu siswa dalam memahami dan beradaptasi dengan kebutuhan lingkungannya, serta menyelesaikan setiap tantangan yang mungkin timbul dalam lingkungannya. Johar Permana dalam (Sulistiyono, 2022) menegaskan bahwa disiplin adalah keadaan yang dibentuk dan dibentuk melalui urutan tindakan yang mencontohkan prinsip ketaatan, kepatuhan, organisasi, dan struktur.

Berdasarkan pengertian yang ada, dapat disimpulkan karakter disiplin adalah sikap seseorang dalam mentaati peraturan atau ketentuan yang telah berlaku tanpa paksaan dengan tidak mengharapkan pamrih.

2.1.3.2 Indikator Karakter Disiplin

Menurut Octivia, E., & Sumanto, I (2019). Deskripsi dan indikator nilai disiplin dalam membentuk pendidikan karakter yaitu:

2.2 Tabel Indikator Karakter Disiplin

No	Indikator Disiplin	Deskripsi Operasional
1	Disiplin Waktu (<i>Punctuality</i>)	Kemampuan siswa dalam menghargai, mengelola, dan menepati waktu yang telah ditentukan oleh pihak madrasah.
2	Disiplin Penegakan Aturan (<i>Regulatory Compliance</i>)	Sikap patuh, tunduk, dan taat siswa terhadap segala bentuk tata tertib, regulasi, dan kode etik tertulis maupun tidak tertulis

		di lingkungan madrasah.
3	Disiplin Belajar & Akademik (<i>Academic Discipline</i>)	Kesadaran dan konsistensi siswa dalam melaksanakan tugas-tugas perkembangan akademiknya secara mandiri dan bertanggung jawab.
4	Disiplin Perilaku Sosial (<i>Social Conduct Discipline</i>)	Kemampuan siswa dalam mengendalikan diri, menjaga ketertiban umum, dan menghormati hak-hak orang lain di lingkungan sosialnya.
5	Disiplin Penggunaan Sarana Madrasah (<i>Facility Care</i>)	Sikap tertib dalam memanfaatkan, menjaga, dan mengembalikan fasilitas atau sarana prasarana milik sekolah sesuai dengan prosedur yang benar.

Sumber: Octivia, E., & Sumanto, I (2019)

2.1.4 Nilai Karakter Sopan Santun

2.1.4.1 Pengertian Sopan Santun

Secara umum bertata krama, sopan santun diartikan sebagai sifat yang baik atau terpuji. Santun adalah perilaku yang baik, yang dilihat dari tutur bahasanya ataupun dari tingkah lakunya. Dalam KBBI yang dikutip oleh Ira (2022), sopan santun adalah budi pekerti yang baik, bertata krama, beradap, dan bersusila. Sopan santun ialah istilah yang diartikan sebagai perilaku seseorang yang menjunjung tinggi nilai dan norma dalam menghormati, menghargai, tidak angkuh dan berperilaku terpuji.

Sopan santun atau tata krama adalah suatu tata cara atau aturan yang turun temurun dan berkembang dalam suatu budaya masyarakat, yang bermanfaat dalam pergaulan dengan orang lain, agar terjalin hubungan yang akrab, saling pengertian, hormat-menghormati menurut adat yang telah ditentukan (Suharti, 2020). Perwujudan dari perilaku sopan santun ini adalah perilaku yang menghormati orang lain melalui komunikasi menggunakan bahasa yang tidak meremehkan atau merendahkan orang lain. Sikap sopan santun dibuktikan dengan cara menghormati orang yang lebih tua, dengan menggunakan bahasa yang sopan dan nada yang lembut. Seseorang memiliki nilai kesantunan dengan beberapa kriteria, misalnya: menghormati orang yang lebih tua, menyapa jika bertemu

dengan orang lain, berbicara dengan nada yang lembut dan berbahasa yang santun, serta berperilaku yang baik (Zuriah, 2022).

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka disimpulkan bahwa perilaku sopan santun ialah tindakan seseorang yang menjunjung tinggi nilai dan norma dalam menghargai, menghormati, berakhlak mulia. Perilaku sopan santun juga dapat diartikan sebagai tindakan seseorang dalam mengatur diri dalam peraturan hidup yang muncul karena pergaulannya dengan individu lain sehingga membentuk suatu etika bagi dirinya.

2.1.4.2 Indikator Karakter Sopan Santun

Indikator Sopan Santun Menurut Kurniasih dan Sani (2020) mengemukakan indikator sopan dan santun adalah sebagai berikut:

2.3 Tabel Indikator Karakter Sopan Santun

No	Indikator Sopan Santun	Deskripsi Operasional
1	Kesantunan Berbahasa (<i>Verbal Politeness</i>)	Kemampuan siswa dalam memilih kata, mengontrol volume suara, dan menggunakan gaya bahasa yang baik, halus, serta menghormati lawan bicara.
2	Sikap Hormat Kepada Orang Tua & Pendidik (<i>Deference to Authority</i>)	Manifestasi rasa takzim, patuh, dan hormat siswa kepada figur yang lebih tua atau memiliki otoritas keilmuan di madrasah.
3	Etika Pergaulan Antarteman (<i>Peer-to-Peer Etiquette</i>)	Sikap saling menghargai, menjaga perasaan, dan bertenggang rasa sesama teman sebaya tanpa adanya unsur intimidasi atau perundungan
4	Kesantunan Perilaku & Gestur Tubuh (<i>Non-Verbal Politeness</i>)	Tata krama gerak-gerik tubuh, ekspresi wajah, dan sikap fisik siswa yang menunjukkan keramahan serta kenyamanan bagi lingkungan sekitar.
5	Pembiasaan Kata Ajaib / Budaya Madrasah (<i>Social Norm Integration</i>)	Spontanitas siswa dalam mengintegrasikan nilai-nilai moral universal dan akhlakul karimah ke dalam interaksi sosial sehari-hari.

Sumber: Kurniasih dan Sani (2020)

2.2 Penelitian Relevan

Yanuar Adi Prakoso, Rahmanu Wijaya (2022) dengan judul penelitian Kompetensi Guru PPKn Dalam Mengembangkan Karakter Disiplin Dan Sopan Santun. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa Pendidikan kewarganegaraan dalam materinya memuat tentang pendidikan karakter yang bertujuan untuk mengembangkan siswa menjadi warga negara yang berkarakter sesuai Pancasila. Dapat disimpulkan bahwa karakter yang positif atau baik disini dimulai dari memahami informasi-informasi tentang kebaikan, kemudian membuat niatan untuk berbuat kebaikan, dan yang terakhir benar benar berbuat (melakukan sebuah tindakan dan perilaku kebaikan). Selaras dengan yang dilakukan guru PPKn dalam usahanya mengembangkan keempat kompetensinya itu. Untuk menyukseskan itu semua baik dari karakter disiplin dan sopan santun, maka perlunya seorang guru PPKn untuk memiliki keempat pencapaian kompetensi sehingga ketika dalam meningkatkan mutu pendidikan bisa secara tepat dan efektif, serta dilakukan interaksi yang edukatif antara guru dengan siswa bertujuan agar dapat merubah perilaku siswa yang sebelumnya.

Juri, Sapto Purnomo, Franciska Regina Beeta (2023) dengan judul penelitian Peran Guru Ppkn Dalam Membentuk Karakter Disiplin Siswa Di SMA Negeri 2 Belimbing. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa para guru, terutama guru PPKn memiliki peran cukup penting dalam membentuk karakter disiplin siswa. Adapun beberapa strategi yang dipakai, seperti memelopori berdirinya kantin kejujuran, datang ke sekolah tepat waktu, masuk dan keluar kelas sesuai jadwal yang telah ditentukan sebelumnya, berpenampilan rapi, menerapkan peraturan sekolah dengan baik dan benar dan bekerjasama dengan guru yang lain.

Septi Rotari, Tri Indrayati, Mita Purnama (2025) dengan judul penelitian Peran Guru PPKn daam Meningkatkan Karakter Disiplin Siswa pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila di Sekolah. Pada hasil penelitian peran guru dalam meningkatkan karakter disiplin siswa melaui mata Pelajaran Pendidikan Pancasila. Didapati bahwa, guru memiliki peranan yang sangat penting daam menumbuhkan dan juga mengembangkan karakter disiplin dari setiap siswa. Ha ini dapat terlihat dari tindakan pada saat mata pelajaran Pendidikan Pancasila

berlangsung, guru mengamalkan nilai-nilai Pancasila antara lain karakter disiplin. Pada karakter disiplin, terlihat pada proses pembelajaran melalui materi Pendidikan Pancasila serta adanya Tindakan disiplin dari kartu kendai yang diterapkan di sekolah.

2.3 Kerangka Teoritis

Landasan berpikir yang efektif dan membantu dalam pemecahan masalah adalah kerangka teori. Konsep-konsep penting yang menunjukkan sudut pandang dari mana pertanyaan penelitian akan muncul dimasukkan ke dalam kerangka teori yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian (Nawawi 2022). Kerangka teori berfungsi sebagai landasan bagi pendekatan pemecahan masalah dalam penelitian:

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai mata pelajaran yang berfokus pada pembentukan warga negara yang baik (*good citizenship*), yang sadar akan hak dan kewajibannya, serta memiliki karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pendidikan Kewarganegaraan menguraikan bagaimana konten Pendidikan Kewarganegaraan, seperti etika, tata krama, dan adat istiadat, secara langsung berfungsi sebagai wahana internalisasi dan transfer nilai-nilai karakter tertentu.

Peran guru menurut Praty Katz dalam (Aini 2020) adalah menggambarkan peran guru sebagai komunikator, sahabat yang dapat memberikan nasihat – nasihat, motivator sebagai pemberi dorongan dan inspirasi, pembimbing dalam mengembangkan sikap, tingkah laku menjadi bertanggung jawab dan mandiri serta nilai – nilai moral, dan menguasai bahan ajar yang akan diajarkan. Guru sebagai pendidik (fasilitator, pembimbing, inspirator), sebagai teladan (*role model*), motivator, dan evaluator.

Keteladanan guru merupakan tindakan penanaman akhlak yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki profesi dengan menghargai ucapan, sikap dan perilaku sehingga dapat ditiru orang lain yang dilakukan oleh pengajar kepada peserta didik. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Mulyasa (2014) bahwa keteladanan guru adalah sikap yang mempunyai pengaruh besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan sehingga berfungsi untuk membentuk

kepribadian anak guna menyiapkan dan mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM).

Karakter disiplin adalah tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan (Heri Gunawan, 2022). Disiplin adalah keadaan yang dibentuk dan dibentuk melalui urutan tindakan yang mencontohkan prinsip ketaatan, kepatuhan, organisasi, dan struktur.

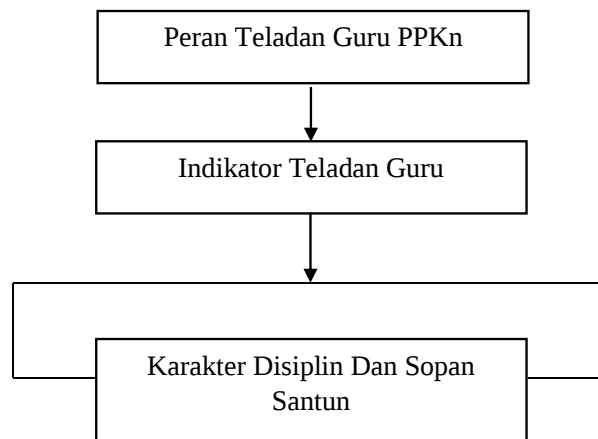
Dalam KBBI yang dikutip oleh Ira (2022), Tata krama, kesantunan, moral, dan tata krama merupakan komponen dari tata krama. Frasa "kesopanan" mengacu pada perilaku seseorang yang menghormati, menghargai, dan menjunjung tinggi konvensi dengan bersikap sopan, menghargai, dan bertindak sesuai norma. Perilaku yang baik, santun, dan penuh perhatian terhadap orang lain, baik dalam perkataan maupun perbuatan (misalnya, menyapa, berbicara sopan, menunjukkan rasa hormat kepada teman dan guru).

Agar siswa dapat menghayati nilai-nilai disiplin dan sopan santun, guru kewarganegaraan memainkan peran krusial. Tugas ini paling baik dipenuhi melalui perilaku yang baik, pengajaran yang efisien, dan pembiasaan. Guru kewarganegaraan berada dalam posisi yang unik karena etika dan moralitas kewarganegaraan secara intrinsik terkait dengan rencana pembelajaran mereka. Melalui sejumlah strategi krusial, guru kewarganegaraan secara aktif dan terpusat berkontribusi pada pengembangan nilai-nilai karakter siswa, yaitu tanggung jawab, disiplin, dan sopan santun. Kualitas karakter dimasukkan ke dalam materi pelajaran yang relevan oleh guru kewarganegaraan. Cara utama untuk menanamkan prinsip-prinsip moral ini adalah melalui kurikulum kewarganegaraan, yang mengintegrasikan Pancasila dengan nilai-nilai kewarganegaraan.

Jika mempertimbangkan semua hal, guru kewarganegaraan membantu siswa membangun kemampuan sosial dan emosional yang kuat di samping memberikan pengetahuan akademis, yang menjadikan mata pelajaran ini penting untuk pengembangan karakter moral siswa.

2.3.1 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual, menurut Notoatmodjo (2020), adalah kerangka hubungan antarkonsep yang diukur atau diamati dalam penelitian. Kerangka konseptual harus mampu menunjukkan bagaimana variabel yang diteliti saling berkaitan. Kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual